

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
Bab I Pendahuluan	Hal
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Batasan Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian	10
1.6. Kerangka Teori	10
1.6.1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	10
1.6.2. Teori Kewenangan.....	14
1.6.3. Tujuan Hukum	16
1.6.4. Teori Efektivitas Hukum	21
1.7. Sistematika Penulisan.....	25
Bab II Tinjauan Pustaka	
2.1. Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Wujud Negara Hukum dan Demokrasi	27
2.1.1. Konsep Negara Demokrasi	27
2.1.2. Konsep Negara Hukum.....	31
2.1.3. Pemilihan Kepala Daerah Serentak.....	36
2.1.4. Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	37
2.2. Tinjauan Umum Kewenangan, Putusan, dan Asas-asas Hukum Acara	
Mahkamah Konstitusi.....	39
2.2.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	39
2.2.2. Putusan Mahkamah Konstitusi	42
2.2.3. Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	44

BAB III Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian	51
3.2. Sifat Penelitian	52
3.3. Bahan Hukum	54
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	55
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	55

BAB IV Hasil dan Pembahasan

4.1. Hukum Acara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak	56
4.1.1. Pedoman Beracara Mahkamah Konstitusi Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak.....	60
4.1.2. Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak oleh Mahkamah Konstitusi.....	71
4.1.3. Diskursus Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif Penyelesaian PHP Kada Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.....	72
4.1.4. Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap Pembatasan dalam Pengajuan Permohonan PHP Kada	75
4.2. Proses Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 oleh Mahkamah Konstitusi	86
4.2.1. Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan	86
4.2.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	88
4.2.3. Kedudukan Hukum	88
4.2.4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.....	89
4.2.5. Pokok Permohonan	90
4.2.6. Petitum	94
4.2.7. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016	95
4.3. Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 (Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016)	109
a. Objek Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada.....	111
b. Kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara untuk pembatalan SK KPU Kabupaten Halmahera Selatan	117
c. Status Hukum SK KPU Halmahera Selatan	123
d. Status SK KPU Halmahera Selatan dalam putusan Mahkamah	124

BAB V Kesimpulan dan Saran	
5.1. Kesimpulan	126
5.2. Saran	127
Daftar Pustaka.....	127

DAFTAR TABEL	Halaman
Tabel1. Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi Tahun 2010 s.d.2014	3
Tabel 2. Jumlah PHP Kada yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan pihak yang mengajukan.....	5
Tabel 3. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam PHP Kada Serentak 2015.....	6
Tabel 4:Perbedaan perolehan suara perselisihan Hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubenur.....	63
Tabel 5. Perbedaan perolehan suara perselisihan Hasil Pilkada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota	64
Tabel 6.Hasil penghitungan suara menurut Surat Keputusan Termohon Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015	88
Tabel.7.Hasil rekapitulasi Perhitungan suara di Kabupaten Halmahera Selatan menurut Termohon.....	90
Tabel.8 Pemohon perolehan suara yang benar dalam rekapitulasi perhitungan suara untuk kabupaten Halmahera Selatan.....	90
Tabel 9. Perbedaan perhitungan perolehan suara di Kecamatan Bacan	92
Tabel 10. Petitum Pemohon mengenai Perolehan Suara Hasil Pemilihan	95
Tabel 11. Hasil Penghitungan surat suara ulang di 8 TPS	101
Tabel 12.Hasil penghitungan surat suara ulang dan Pemungutan suara ulang di Kecamatan Bacan adalah sebagai berikut:.....	107
Tabel 13.Perolehan suara Pemilihan Kecamatan Bacan Berdasarkan putusan MK..	107